



No More Delays—Implement EUDR Now to Protect Forests, Climate, and Lives

Jangan Tunda Lagi—Terapkan EUDR Sekarang untuk Melindungi Hutan, Iklim, dan Kehidupan



We, the undersigned organizations, express our deep concern over the proposed delay and weakening of the European Union Deforestation Regulation (EUDR). At a time when the world is facing escalating climate disasters, biodiversity loss, and economic instability, further postponement of this critical legislation is unacceptable.

The EUDR was designed to ensure that commodities entering the EU market are not linked to deforestation or forest degradation. It is a vital tool for climate action, forest protection, and global sustainability. Yet, recent political developments—including proposals to delay enforcement until December 2026 and an emerging agenda for an additional benchmarking category, a “zero-risk or negligible-risk” country category—threaten to undermine its effectiveness and credibility. Although such an agenda has been put out on the table amid a rise in criticism from the public.

We noted several catastrophic events in 2025 alone around the world, which have caused a serious impact lives on earth:

- **Deadly flash floods in Bali, Indonesia, which are marked as a state emergency**, which are displacing thousands and damaging critical infrastructure. Among others, extreme rainfall and rapid land conversion are noted as causes of this catastrophe¹.
- **Record-breaking heatwaves across Southeast Asia**, causing crop failures and public health emergencies. Experts warn that heat stress will increasingly threaten food security and social stability in the region².
- **Wildfires and droughts in the Amazon and Southern Europe**, destroying ecosystems and releasing massive carbon emissions. Climate change is projected to increase wildfire danger and burnt areas by up to 50% per decade, threatening biodiversity and ecosystem services³.
- **Staggering number of hotspot incident**, from the period of June-July 2025 in Indonesia alone, there were 11,287 hotspots which spanned to 303 peat ecosystems⁴. Because of its vital role

Kami, organisasi yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan keprihatinan mendalam kami atas usulan penundaan dan pelemahan Peraturan Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Di saat dunia menghadapi bencana iklim yang semakin meningkat, hilangnya keanekaragaman hayati, dan ketidakstabilan ekonomi, penundaan lebih lanjut dari kebijakan penting ini tidak dapat diterima.

EUDR dirancang untuk memastikan bahwa komoditas yang masuk ke pasar UE tidak terkait dengan deforestasi atau degradasi hutan. Ini adalah kebijakan yang penting untuk aksi iklim, perlindungan hutan, dan keberlanjutan global. Namun, perkembangan politik terbaru—termasuk usulan untuk menunda pelaksanaannya hingga Desember 2026 dan wacana yang muncul untuk memperluas kategori benchmarking, negara “risiko nol atau risiko yang dapat diabaikan”—berpotensi melemahkan efektivitas dan kredibilitasnya. Meskipun wacana tersebut ditangguhkan ditengah kritikan keras dari publik.

Kami mencatat beberapa peristiwa bencana alam katastropik pada tahun 2025 saja di seluruh dunia, yang telah menyebabkan dampak serius pada kehidupan di dunia:

- **Banjir bandang mematikan di Bali Indonesia, hingga dinobatkan sebagai kejadian darurat negara**, mengungsikan ribuan orang dan merusak infrastruktur penting. Di antara penyebab lainnya, curah hujan ekstrem dan konversi lahan yang cepat dicatat sebagai penyebab bencana ini¹.
- **Gelombang panas yang memecahkan rekor di seluruh Asia Tenggara**, menyebabkan kegagalan panen dan keadaan darurat kesehatan masyarakat. Para ahli memperingatkan akan semakin mengancam ketahanan pangan dan stabilitas sosial di kawasan ini².
- **Kebakaran hutan dan kekeringan di Amazon dan Eropa Selatan**, menghancurkan ekosistem dan melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar. Perubahan iklim diproyeksikan akan

in carbon sink, and the immense amount of carbon release caused by fire and contributing to the climate crises, it therefore needs a holistic approach to mitigate such risk.

These disasters are not isolated events—they are the direct result of deforestation and climate change. Delaying EUDR now will only accelerate these crises, costing lives, livelihoods, and the future of our planet.

Indonesia's forests remain under threat. Between 2023 and 2024 alone, 216,000 hectares of forest were lost, 25% of which occurred within oil palm concession areas⁵. In West Papua, over 800,000 hectares of forest have been cleared since 2000, and 1.9 million hectares remain at risk due to palm and timber concessions. Meanwhile, 3.4 million hectares of oil palm remain illegally planted in state forest areas⁶. Amnesty processes have favored large corporations, while millions of hectares still sit in legal limbo, risking further deforestation and illegality if not addressed through strong, enforced policy.

Furthermore, the economic consequences of inaction are severe. Postponement of EUDR is not necessary to remove the compliance cost to those who already invest in the EUDR compliance at an early stage. Further delays will significantly make a market gap and put the smallholders at risk, that will exclude them from the supply chain. On the other hand, the absence of the economic incentive during the delay will significantly extend the gap that can be afforded by them. Furthermore, climate-related losses in Indonesia between 2020-24 are impacting Indonesia's GDP by 0.66 – 3.45%⁷, on the other hand, between 2021-23 in the EU are estimated to be around 22%⁸. Given this figure, global commodity markets apparently are already destabilized by extreme weather and supply chain disruptions. Businesses that have invested in sustainability and traceability systems deserve regulatory certainty—not political retreat.

Indonesia has taken meaningful steps to align with EUDR, including the improvement of ISPO standard, notably through improve principle and criteria and broader scope which now include both upstream and downstream sector to ensure the oil palm supply

meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan area yang terbakar hingga 50% per dekade, mengancam keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem³.

- **Jumlah kejadian titik panas yang tinggi**, pada periode Juni-Juli 2025 di Indonesia sendiri, tercatat sebanyak 11,287 titik panas yang terjadi pada 303 ekosistem gambut⁴, Sebagai bagian penting dalam penyerapan karbon, dan jumlah karbon dioksida yang diemisikan dari kebakaran yang berkontribusi pada krisis iklim global, oleh karenanya dibutuhkan pendekatan yang holistik untuk memitigasi risiko-risiko tersebut.

Bencana-bencana ini bukanlah peristiwa yang terjadi tanpa sebab—mereka adalah hasil langsung dari deforestasi dan perubahan iklim. Menunda EUDR sekarang hanya akan mempercepat krisis ini, mengorbankan nyawa, mata pencaharian, dan masa depan planet kita.

Hutan Indonesia dalam ancaman. Dalam periode tahun 2023-24 sendiri, sebanyak 216,000 hektar hutan telah hilang, 25% diantaranya terjadi di dalam area konsesi perkebunan kelapa sawit⁵. Di Papua Barat, sekitar lebih dari 800,000 hektar hutan telah dibabat bersih sejak tahun 2000, dan 1.9 juta hektar lainnya masih dalam ancaman akibat dari kelapa sawit dan izin konsesi kehutanan. Sementara 3.4 juta hektar kelapa sawit masih berstatus ilegal yang beroperasi di dalam kawasan hutan⁶. Proses pemutihan telah menguntungkan bagi korporasi besar, sementara jutaan hektar masih belum memiliki status legal, deforestasi lebih lanjut dan ilegalitas jika tidak diselesaikan dengan kebijakan yang kuat dan diterapkan dengan baik.

Lebih jauh, penundaan ini akan memiliki konsekuensi ekonomi yang serius. Penundaan EUDR tidak serta merta menghilangkan biaya kepatuhan yang telah dilakukan oleh mereka yang telah lebih dulu berinvestasi pada proses pemenuhan persyaratan EUDR. Penundaan yang lebih lanjut akan berdampak pada kesenjangan pasar dan merugikan petani kecil yang semakin tersingkirkan dari rantai suplai. Disisi lain, ketiadaan insentif ekonomi dari UE selama periode penundaan akan

produce legally and meet the sustainable standard, acceleration of e-STDB certification, improving and strengthening the timber supply chain through the adoption of the geolocation aspect under the SVLK+ program, development of a National Dashboard for the commodity traceability system, and continuing bilateral dialogue Indonesia-EU to strengthen and enforce implementation of this regulation, although inclusive, accountable and transparent processes need to be strengthened. These efforts must be met with a firm commitment from the EU to uphold the integrity and timeline of the regulation.

We call on the European Commission, Parliament, and Member States to:

- 1. Reject further delays to EUDR implementation.**
- 2. Maintain strong enforcement mechanisms,** including transparent benchmarking and geolocation requirements.
- 3. Ensure inclusive and equitable compliance pathways** for workers, smallholders and Indigenous communities.
- 4. Lead by example in global climate governance, not retreat under pressure.**
- 5. Strongly reject any action that will reduce the environmental safeguard in EUDR** regulation through the environmental omnibus package. Such an attempt will have negative consequences in global climate action initiatives.
- 6. Mobilize and strengthen support for both technical and financial incentives** for smallholders so they can comply with the regulation while securing the income.

The climate crisis is accelerating. Forests are burning. Economies are breaking. The time to act is now. The EUDR must be implemented without compromise—for the future of forests, people, and life on Earth.

semakin memperbesar kesenjangan kepatuhan yang dapat dicapai oleh petani kecil. Lebih lanjut kerugian terkait iklim di Indonesia antara tahun 2020-24 berdampak pada PDB Indonesia sebesar 0,66 – 3,45%⁷, di sisi lain, antara tahun 2021-23 di UE diperkirakan sekitar 22%⁸. Melihat angka-angka ini, pasar komoditas global tampaknya sudah tidak stabil akibat cuaca ekstrem dan gangguan rantai pasokan. Bisnis yang telah berinvestasi dalam sistem keberlanjutan dan ketertelusuran layak mendapatkan kepastian regulasi—bukan penarikan politik.

Indonesia telah mengambil langkah-langkah pembenahan untuk menyelaraskan dengan EUDR, termasuk penguatan standar ISPO, utamanya pada aspek PNK dan ruang lingkup pengaturan yang saat ini melingkupi pengaturan pada hulu-hilir guna memastikan rantai pasok sawit diproduksi secara legal dan memenuhi aspek standar keberlanjutan, percepatan pengakuan legalitas lahan bagi petani kecil swadaya melalui program e-STDB, meningkatkan dan memperkuat rantai pasokan kayu melalui adopsi aspek geolokasi di bawah program SVLK+, pengembangan Dasbor Nasional untuk sistem ketertelusuran komoditas dan melanjutkan dialog bilateral Indonesia-UE guna memperkuat dan menerapkan kebijakan ini, meskipun inklusifitas, akuntabilitas dan transparansi atas proses-proses ini perlu diperkuat. Upaya-upaya ini harus disertai dengan komitmen tegas dari UE untuk menjaga integritas dan tata waktu kebijakan.

Kami menyerukan kepada Komisi Eropa, Parlemen, dan Negara Anggota untuk:

- 1. Menolak penundaan lebih lanjut terhadap implementasi EUDR.**
- 2. Mempertahankan mekanisme pelaksanaan,** termasuk benchmarking yang transparan dan persyaratan geolokasi.
- 3. Memastikan aspek kepatuhan yang inklusif dan adil** bagi pekerja, petani kecil dan komunitas adat.
- 4. Memimpin dengan memberi contoh dalam tata kelola iklim global, bukan mundur di bawah tekanan.**
- 5. Menolak dengan tegas segala macam bentuk pelemahan standar lingkungan di dalam kebijakan EUDR** melalui environmental omnibus package oleh EU. Pelemahan standar akan malah justru memperburuk inisiatif aksi iklim global.
- 6. Memobilisasi dan memperkuat dukungan baik teknis dan insentif ekonomi** bagi petani kecil agar dapat memenuhi kebijakan EUDR dengan tetap mempertahankan pendapatan.

Krisis iklim semakin cepat. Hutan terbakar. Ekonomi diambang kehancuran. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang. EUDR harus diimplementasikan tanpa kompromi—demi masa depan hutan, manusia, dan kehidupan di Bumi.

Reference / Referensi

- 1 Globalclimaterisk. 2025. *Online*. Available at: <https://globalclimaterisks.org/insights/blog/bali-indonesias-worst-floods-in-a-decade/>. Accessed on October, 1st 2025.
- 2 The State of Southeast Asia: 2025 Survey Report. 2025. Available at: https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2025/06/ISEAS_Perspective_2025_48.pdf. Accessed on October 1st, 2025.
- 3 Dupuy, JI., Fargeon, H., Martin-StPaul, N. et al. 2020. Climate change impact on future wildfire danger and activity in southern Europe: a review. *Annals of Forest Science* 77, 35. Availabe at: <https://doi.org/10.1007/s13595-020-00933-5>
- 4 APNews. 2025. *Online*. Available at: <https://apnews.com/article/indonesia-malaysia-forest-peat-land-fires-haze-71e77f2a2ecab1610431343cb99a0f7f>. Accessed on October 1st, 2025
- 5 Madani. 2024. *Online*. Available at: <https://madaniberkelanjutan.id/deforestasi-di-rezim-transisi-hilangnya-hutan-alam-tahun-2024/>. Accessed on October 1st, 2025
- 6 Kumparan. 2025. *Online*. Available at: <https://kumparan.com/kumparannews/satgas-pkh-telah-kuasai-kembali-3-4-juta-hektare-lahan-kebun-sawit-ilegal-25udhnGVerD>. Accessed on October, 1st 2025
- 7 Tempo. 2024. *Online*. Available at: <https://en.tempo.co/read/1837122/indonesia-loses-rp544tn-from-climate-change-impact-in-2020-2024>. Accessed on October, 1st 2025
- 8 EEA. 2024. *Online*. Available at: <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/economic-losses-from-climate-related>. Accessed on October, 1st 2025

The Signatories / Para Penandatanganan

- | | |
|--|---|
| 1. Kaoem Telapak | 15. Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) |
| 2. Pusaka | 16. Koalisi Buruh Sawit (KBS) |
| 3. Auriga Nusantara | 17. Sawit Watch |
| 4. Madani Berkelanjutan | 18. PHD PEREMPUAN AMAN Lou Bawe |
| 5. WALHI | 19. Lembaga Pemerhati Dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau (LP3M) |
| 6. Working Group Indigenous Peoples and Local Community Conserved Areas and Territory Indonesia (WGII) | 20. Etnika Kosmologi Khatulistiwa |
| 7. The Institute For Ecosoc Rights | 21. Pantau Gambut |
| 8. Forest Watch Indonesia (FWI) | 22. Koalisi Perempuan Indonesia |
| 9. Satya Bumi | 23. Green of Borneo |
| 10. Independent Forest Monitoring Fund (IFM Fund) | 24. Link-Ar Borneo |
| 11. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) | 25. Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta |
| 12. Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia (FAMM Indonesia) | 26. Anak Muda Adat Knasaimos (AMAK) |
| 13. Kaharingan Institute Indonesia | 27. ELSAM |
| 14. Teraju Foundation | 28. PADI Indonesia |
| | 29. Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari (PLHL) |